



Membangun Keadilan dari Memori: Pelajaran Moral dan Sosial dari Adegan Ketidakadilan dalam Film Bumi Manusia

Agustinus Abraham

Universitas Sanata Dharma, Indonesia

Penulis Korespondensi: agustinusabraham3@gmail.com

Abstract. *This study examines the representation of injustice in the film Bumi Manusia as a medium of collective memory and moral reflection for contemporary Indonesian society. Using a qualitative method with a literature-based approach, the research identifies seven key scenes that portray forms of structural injustice related to race, gender, law, power, and access to knowledge. The analysis reveals that these depictions not only illustrate the oppressive colonial system but also resonate with present-day social realities in Indonesia, where legal inequality, marginalization, and power abuse persist. The findings show that the film offers significant moral and social lessons: the primacy of human dignity, the necessity of a humane legal system, the role of education as a path to liberation, and the ethical responsibilities embedded in power relations. Furthermore, the film's narrative demonstrates how historical memory shapes critical awareness and encourages resistance against ongoing injustice. The study concludes that Bumi Manusia functions as a cultural text that bridges past and present, providing insights for building a just, dignified, and civilized society today.*

Keywords: *Collective Memory; Colonialism; Human Dignity; Injustice; Social Ethics.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji representasi ketidakadilan dalam film Bumi Manusia sebagai sarana ingatan kolektif dan refleksi moral bagi masyarakat Indonesia masa kini. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi tujuh adegan utama yang memperlihatkan bentuk-bentuk ketidakadilan struktural terkait ras, gender, hukum, kekuasaan, dan akses terhadap pengetahuan. Analisis menunjukkan bahwa representasi tersebut tidak hanya menggambarkan sistem kolonial yang menindas, tetapi juga merefleksikan realitas sosial kontemporer di Indonesia yang masih ditandai ketimpangan hukum, marginalisasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Temuan penelitian menggarisbawahi pesan moral dan sosial yang penting: penegasan martabat manusia, perlunya hukum yang humanis, peran pendidikan sebagai jalan pembebasan, serta tanggung jawab etis dalam relasi kuasa. Narasi film juga menegaskan bahwa ingatan historis berperan membentuk kesadaran kritis dan mendorong perlawanan terhadap ketidakadilan yang terus berulang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bumi Manusia berfungsi sebagai teks budaya yang menghubungkan masa lalu dan masa kini serta memberikan wawasan bagi pembangunan masyarakat yang lebih adil, bermartabat, dan beradab.

Kata Kunci: Etika Sosial; Ingatan Kolektif; Keadilan; Kolonialisme; Martabat Manusia.

1. LATAR BELAKANG

Dalam konteks sosial Indonesia masa kini, persoalan ketidakadilan masih menjadi realitas yang terus berulang dalam berbagai bentuk: ketimpangan ekonomi, diskriminasi gender, bias hukum, hingga ketidaksetaraan akses pendidikan. Meskipun Indonesia telah merdeka selama puluhan tahun, pola-pola ketidakadilan struktural yang pernah melekat dalam sistem kolonial masih menyisakan jejaknya dalam kehidupan modern. Hal ini menegaskan pentingnya membaca kembali sejarah, bukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai sumber refleksi moral, edukatif, dan inspiratif untuk membangun kesadaran kritis terhadap keadilan (Hardjasaputra, 2019). Masyarakat mesti memahami bahwa keadilan sungguh merupakan proses atau hasil penggunaan hukum untuk menilai kasus secara adil, memperbaiki ketidakadilan, dan menghukum kejahatan (*Definition of JUSTICE*, 2025).

Sejak sebelum kemerdekaan Negara Indonesia, realitas ketidakadilan telah dialami oleh manusia Nusantara. Pramoedya Ananta Toer menuliskan ketidakadilan pada zaman itu dalam sebuah novel yang sangat fenomenal dengan judul "*Bumi Manusia*" (Toer, 2002). Novel karya Pramoedya ini telah diadaptasi menjadi sebuah *film*. Film *Bumi Manusia*, adaptasi dari karya Pramoedya Ananta Toer, menghadirkan representasi kuat tentang ketidakadilan pada masa kolonial. Melalui tokoh-tokoh seperti Minke, Nyai Ontosoroh, dan Annelies, film ini membuka ruang pembacaan mendalam mengenai bagaimana kekuasaan kolonial menciptakan hierarki ras, gender, dan kelas sosial. Adegan-adegan ketidakadilan dalam film tersebut bukan sekadar rekonstruksi sejarah, tetapi menggambarkan dinamika sosial yang paralel dengan realitas kontemporer. Dengan demikian, film ini dapat dijadikan media reflektif yang menghubungkan memori historis dengan perjuangan mewujudkan keadilan pada masa kini. Film ini juga menjadi titik tolak refleksi agar kejadian yang sama tidak terulang kembali (Rahmawati dkk., 2022).

Ingatan akan sejarah merupakan unsur yang sangat penting dalam usaha untuk membangun keadilan. Sejarah kolektif dapat menjadi jendela untuk menelusuri perubahan budaya dan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya, termasuk perkembangan bahasa, seni, agama, filsafat, serta unsur-unsur budaya lainnya. Pertemuan dan interaksi antarkebudayaan turut membentuk mozaik sejarah kolektif yang rumit. Dengan demikian, sejarah kolektif mampu memperlihatkan bagaimana masyarakat bertumbuh dan membangun peradabannya di berbagai bidang. Namun, sejarah ini tidak hanya berisi keberhasilan; ia juga sarat dengan konflik, tantangan, dan pergulatan. Perang, krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan persoalan lingkungan merupakan bagian dari dinamika tersebut. Cara suatu masyarakat menghadapi dan mengatasi berbagai masalah itu memberikan gambaran tentang ketangguhan dan kemampuan adaptasi mereka (Said dkk., 2023).

Membangun keadilan dari ingatan berarti menjadikan pengalaman sejarah sebagai pelajaran moral dan sosial. Ingatan kolektif tentang ketidakadilan kolonial mendorong masyarakat untuk mengenali pola penindasan yang serupa dalam bentuk modern. Karena itu, kajian terhadap film *Bumi Manusia* dapat menghadirkan kontribusi penting dalam memahami bagaimana representasi seni mampu mempengaruhi kesadaran publik tentang keadilan, martabat manusia secara khusus juga kaum perempuan (Akbar, 2017) dan nilai-nilai perlawanan moral terhadap ketidakadilan struktural.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tujuh adegan ketidakadilan dalam film *Bumi Manusia*. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap nilai moral dan sosial yang dapat dipetik dari adegan-adegan tersebut. Bertolak dari film tersebut,

ditampilkan juga relevansi historis dan etis dari representasi ketidakadilan dalam film terhadap perjuangan keadilan kontemporer.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. (1) Bentuk-bentuk ketidakadilan apa saja yang direpresentasikan dalam adegan-adegan kunci film *Bumi Manusia*? (2) Pesan moral dan sosial apa yang terkandung dalam representasi ketidakadilan tersebut? (3) Bagaimana ingatan dan representasi ketidakadilan dalam film ini dapat memberikan pelajaran bagi upaya membangun keadilan pada masa kini?

2. KAJIAN TEORITIS

Bumi Manusia berpusat pada kisah Minke, seorang pemuda pribumi dari keluarga bangsawan yang mendapat pendidikan ala Eropa di masa penjajahan Belanda. Dengan kemampuan intelektualnya, Minke berupaya membangun identitas sebagai manusia merdeka yang setara dengan orang Eropa. Kehidupannya berubah ketika ia mengenal keluarga Herman Mellema dan jatuh cinta pada Annelies, putri dari Nyai Ontosoroh—seorang wanita pribumi yang meski berstatus “nyai”, mampu meningkatkan martabat dan kedudukannya melalui kerja keras dan kecerdasan (Toer, 2002).

Hubungan Minke dengan keluarga itu membuka matanya terhadap realitas kejam masyarakat kolonial. Ia melihat bagaimana hukum dan norma kolonial membuat pribumi selalu berada dalam posisi lemah dan tidak berdaya. Nyai Ontosoroh, yang menjadi figur perempuan tangguh dan simbol perlawanan, mengajarkan Minke arti martabat dan keteguhan di tengah diskriminasi rasial. Konflik mulai muncul ketika masa lalu kelam Herman Mellema dan sistem hukum kolonial menyeret keluarga tersebut ke dalam pusaran masalah yang rumit.

Puncak tragedi terjadi ketika Annelies direnggut dari sisi Minke melalui keputusan hukum Belanda yang berat sebelah, menunjukkan bagaimana kekuasaan kolonial sanggup menghancurkan kehidupan pribadi rakyat jajahan. Minke dipaksa berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa kecerdasan, pendidikan, dan status sosialnya tak mampu menandingi struktur kekuasaan kolonial yang tidak adil. Novel ini menutup perjalanan Minke dengan kesadaran mendalam tentang identitas, perjuangan, dan pentingnya melawan ketidakadilan—sebuah refleksi kritis atas kondisi sosial-politik Nusantara pada masa itu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. John W. Creswell dan Cheryl N. Poth menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah aktivitas yang menempatkan peneliti langsung dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini berupaya menampilkan dunia sebagaimana adanya, lalu mengubahnya ke dalam berbagai bentuk representasi seperti catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, hingga memo pribadi. Dengan demikian, peneliti kualitatif mempelajari fenomena dalam lingkungan alaminya untuk memahami atau menafsirkan maknanya (Creswell & Poth, 2018). Studi pustaka sendiri menjadi bagian penting dari penelitian kualitatif karena memuat rangkuman penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti (Abraham, 2025b; Agustini dkk., 2024). Pendapat lain menjelaskan bahwa analisis isi adalah metode yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna dalam sebuah informasi atau pesan (Ahmad, 2018). Metode ini banyak diterapkan di berbagai bidang ilmu karena mampu menganalisis beragam bentuk komunikasi, termasuk media daring.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adegan dalam Film



Gambar 1. Peta Konsep.

Ketidakadilan terhadap Nyai Ontosoroh sebagai “nyai”

Ketika Nyai Ontosoroh diperlakukan rendah oleh masyarakat Belanda hanya karena statusnya sebagai perempuan pribumi yang “dibeli” Tuan Mellema, film menghadirkan gambaran telanjang tentang bagaimana kolonialisme merampas martabat perempuan pribumi. Ia tidak hanya mengalami diskriminasi ras yang menempatkannya sebagai manusia kelas dua, tetapi juga diskriminasi gender yang memperlakukannya sebagai objek, bukan subjek yang berhak menentukan hidupnya. Statusnya yang tidak diakui sebagai istri sah meskipun ia bekerja keras mengelola rumah, tanah, dan perusahaan menunjukkan bahwa hukum kolonial tidak pernah berpihak pada pribumi, terlebih perempuan. Namun, dari dalam ketidakadilan inilah muncul kekuatan moral Nyai Ontosoroh: ia melawan dengan cara mendidik dirinya, memperluas wawasannya, dan menegakkan martabatnya melalui keteguhan hati.

Pengadilan Perebutan Hak Anak Asuh Annelies

Adegan persidangan yang memutuskan Annelies harus dibawa ke Belanda menggambarkan puncak ketidakadilan sistem kolonial, di mana hukum menjadi alat supremasi rasial, bukan penegak keadilan. Meski Nyai Ontosoroh telah membesarkan dan membentuk Annelies sejak kecil, ikatan keibuannya tidak diperhitungkan karena ia tidak dianggap sebagai ibu yang sah dalam hukum Belanda. Putusan itu mengabaikan sepenuhnya aspek psikologis, emosional, dan moral antara seorang ibu dan anak yang tak terpisahkan. Pengadilan ini menunjukkan bagaimana hukum kolonial bekerja bukan berdasarkan prinsip kemanusiaan, melainkan hierarki rasial yang secara otomatis mengunggulkan Eropa dan melemahkan pribumi.

Minke dipandang Rendah di Sekolah dan Ruang Sosial Eropa

Adegan ketika Minke diejek dan direndahkan oleh siswa maupun guru Eropa menyoroti rasisme struktural yang membatasi akses pendidikan bagi pribumi. Keberadaannya di sekolah elite dianggap sebagai penyimpangan dari tatanan kolonial yang mengistimewakan satu ras dan mendiskriminasi yang lain. Pandangan merendahkan itu mencerminkan upaya sistematis untuk menghalangi pribumi memasuki ruang intelektual yang dapat membangun kesadaran dan perlawanan. Film ini menunjukkan bagaimana pendidikan dijadikan alat untuk melanggengkan struktur sosial yang timpang, sehingga ilmu pengetahuan menjadi ruang eksklusif yang hanya boleh dimiliki kelompok dominan.

Perlakuan Tuan Mellema yang Sewenang-wenang kepada Nyai Ontosoroh

Relasi antara Tuan Mellema dan Nyai Ontosoroh mencerminkan kekejaman struktur kolonial yang menempatkan perempuan pribumi sebagai komoditas yang dapat dimiliki, digunakan, dan ditinggalkan sesuka hati. Meskipun Mellema memberikan rumah dan fasilitas,

semuanya dilakukan tanpa memberikan pengakuan, status hukum, atau jaminan masa depan bagi Nyai. Ia diperlakukan bukan sebagai pasangan hidup, tetapi sebagai properti yang bisa dikendalikan penuh. Ketimpangan relasi kuasa ini menunjukkan bagaimana kolonialisme tidak hanya menjajah tanah, tetapi juga tubuh dan kehidupan perempuan, menjadikan mereka korban lapis ganda dari patriarki dan imperialisme.

Penolakan terhadap Pernikahan Minke dan Annelies

Ketika pernikahan Minke dan Annelies yang dilakukan menurut adat pribumi ditolak oleh pihak kolonial, film ini menunjukkan bagaimana kolonialisme mengatur sampai ke ruang paling intim dalam kehidupan masyarakat jajahan. Penolakan itu tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan dua sistem hukum—di mana hukum pribumi dianggap rendah—tetapi juga memperlihatkan bagaimana kolonialisme mengontrol kebebasan menentukan pasangan dan membangun keluarga. Keputusan tersebut merampas hak personal dan otonomi individu, menjadikan kehidupan keluarga sebagai arena dominasi politik dan hukum kolonial.

Kesombongan dan Superioritas Pejabat serta Tentara Belanda

Adegan para pejabat dan tentara Belanda yang meremehkan penduduk pribumi menggambarkan bagaimana hierarki rasial dilembagakan secara brutal dalam kehidupan sehari-hari. Mereka memandang pribumi sebagai kelas yang tidak beradab, tidak berpendidikan, dan tidak layak diperlakukan setara, terlepas dari kemampuan atau integritas individu tersebut. Sikap meremehkan ini bukan sekadar perilaku personal, tetapi bagian dari struktur sosial yang menopang kolonialisme. Dengan demikian, superioritas ras ini menjadi alat yang sah untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan kesadaran kritis masyarakat pribumi.

Kekuasaan Pers yang Membungkam Suara Pribumi

Ketika tulisan Minke di media dipertanyakan hanya karena ia seorang pribumi, film ini menyoroti bagaimana akses terhadap ruang publik dikendalikan oleh kolonial. Meski tulisannya bermutu dan tajam, suaranya dianggap tidak layak atau bahkan berbahaya bagi stabilitas kekuasaan. Kolonialisme menggunakan pers sebagai alat pembentuk opini yang berpihak pada kepentingan mereka, sehingga suara-suara pribumi disisihkan dari wacana publik. Ini menunjukkan bahwa ketidakadilan tidak hanya terjadi pada ranah fisik atau hukum, tetapi juga pada ranah informasi dan pengetahuan yang menentukan arah pemikiran masyarakat.

Pesan Moral dan Sosial

Martabat Manusia adalah Fondasi Keadilan

Seluruh adegan ketidakadilan mulai dari status “nyai”, penghinaan rasial kepada Minke, hingga superioritas pejabat Belanda menunjukkan bahwa kolonialisme merusak martabat manusia dengan menetapkan hierarki ras, gender, dan kelas. Pesan moral yang terintegrasi adalah bahwa keadilan sejati tidak dapat berdiri tanpa pengakuan martabat manusia sebagai nilai universal. Secara sosial, *Bumi Manusia* mengajak masyarakat modern untuk membangun relasi sosial yang setara dan bebas dari diskriminasi struktural. Manusia selayaknya memperlakukan sesama dengan penuh cinta (Abraham, 2025c) sebagai manusia yang bermoral.

Gagasan tentang martabat manusia sebenarnya bukanlah pemikiran baru. Pada masa Romawi Kuno, Cicero (106–43 SM) telah mengemukakan bahwa martabat manusia melekat pada dirinya karena ia adalah makhluk yang dianugerahi akal budi. Kemampuan intelektual inilah yang menempatkan manusia pada posisi istimewa di tengah seluruh ciptaan. Dalam perkembangan filsafat dan teologi pada Abad Pertengahan, pemahaman tentang martabat manusia bertumpu pada keyakinan bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah, sehingga mampu berpartisipasi dalam akal budi ilahi. Namun, dominasi pemikiran keagamaan pada masa itu perlahan memudar ketika sekularisasi pada Abad Pencerahan mulai menguat. Transformasi ini mengubah cara pandang tentang manusia: manusia Abad Pencerahan dipahami sebagai pribadi yang otonom, dan dari fondasi otonomi inilah konsep martabat manusia kemudian ditegakkan kembali (Madung, 2012).

Hukum dan Kesatuan Harus Berpihak pada Kemanusiaan

Kasus pengadilan perebutan Annelies, penolakan pernikahan Minke-Annelies, dan perlakuan sewenang-wenang terhadap Nyai Ontosoroh menunjukkan bahwa hukum kolonial tidak melayani keadilan, tetapi melayani supremasi kekuasaan. Integrasi pesan moralnya adalah bahwa hukum kehilangan nilai ketika ia menindas dan mengabaikan kebenaran moral. Pesan sosialnya adalah sistem hukum dan politik harus dijaga agar tidak menjadi alat penaklukan, melainkan instrumen yang melindungi kelompok rentan dan menopang keadilan substantif.

Nilai-nilai moral memiliki peran penting dalam ilmu hukum dan tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum. Cara pandang para ahli dan penegak hukum terhadap hukum sebagai aturan yang sarat nilai akan mendorong pencarian kebenaran yang substantif, bukan sekadar formal. Untuk keluar dari pola pikir legalistik-formalistik, diperlukan pengembangan hukum progresif sebagai bagian dari modernisasi sistem hukum. Di Indonesia, penegakan

hukum seharusnya berlandaskan budaya bangsa dan nilai-nilai moral Pancasila yang menjadi dasar sistem hukumnya (Abraham, 2025a; Wulandari, 2020).

Pendidikan dan Pengetahuan sebagai Jalan Pembebasan dan Perlawanan

Pengalaman Minke di sekolah kolonial serta pembungkaman suara pribumi dalam pers memperlihatkan bahwa pengetahuan dapat dikooptasi untuk mempertahankan ketidakadilan, sekaligus dapat menjadi alat pembebasan bila digunakan secara kritis. Pesan moral yang terintegrasi: pendidikan harus membuka ruang kesetaraan, bukan memperkuat hierarki. Pesan sosialnya: masyarakat yang adil perlu memastikan akses pendidikan dan ruang intelektual yang bebas sehingga suara kebenaran dapat disuarakan tanpa takut dibungkam.

Relasi Kekuasaan yang Tidak Bermoral Melahirkan Eksploitasi dan Kekerasan Struktural

Relasi Tuan Mellema–Nyai Ontosoroh, hegemoni pejabat kolonial, serta pembatasan kebebasan individu menunjukkan bahwa ketimpangan kuasa tanpa etika akan melahirkan penindasan. Pesan moralnya adalah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan integritas, penghormatan, dan akuntabilitas. Pesan sosialnya: masyarakat harus mengontrol relasi kuasa agar tidak eksploitatif, terutama terhadap perempuan, masyarakat kecil, dan kelompok yang rentan terhadap dominasi struktural.

Ingatan dan Representasi Ketidakadilan dalam *Bumi Manusia* Memberi Pelajaran bagi Upaya Membangun Keadilan Masa Kini

Representasi ketidakadilan dalam *Bumi Manusia* berfungsi sebagai bentuk ingatan kolektif yang menjaga agar pengalaman kelam kolonial tidak hilang dari kesadaran sosial. Melalui kisah Nyai Ontosoroh, Minke, Annelies, dan struktur kolonial yang menindas, film ini mengajarkan bahwa keadilan masa kini tidak bisa dibangun tanpa memahami luka sejarah dan struktur ketimpangan yang pernah mengatur kehidupan bangsa. Ingatan tersebut menegaskan bahwa diskriminasi ras, marginalisasi perempuan, dan penyalahgunaan hukum yang terjadi di masa lalu bukan sekadar cerita, tetapi jejak struktural yang masih mewarnai banyak realitas sosial masa kini-dari akses pendidikan hingga relasi kuasa.

Pertama, *Bumi Manusia* mengingatkan bahwa martabat manusia harus menjadi dasar keadilan sosial. Rasisme yang dialami Minke dan status “nyai” yang merendahkan Nyai Ontosoroh menunjukkan bagaimana sistem dapat mencabut martabat seseorang. Pelajaran moral bagi masa kini: keadilan tidak dapat dicapai bila masyarakat masih menoleransi stigma, diskriminasi berbasis identitas, atau pelabelan sosial yang merendahkan kelompok tertentu. Ingatan akan masa kolonial menjadi cermin agar masyarakat modern membangun relasi yang setara di ruang pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik digital.

Kedua, film ini memperlihatkan bagaimana hukum dapat menjadi alat penindasan bila tidak berpihak pada kemanusiaan. Kasus perebutan Annelies, penolakan pernikahan Minke–Annelies, dan pembungkaman suara melalui kontrol pers menunjukkan bahwa hukum kolonial tidak netral, tetapi dirancang untuk mempertahankan kekuasaan. Pelajarannya bagi masa kini: sistem hukum harus terus dikritisi, direformasi, dan dijaga agar tidak bias terhadap kelompok tertentu. Ketika hukum dibebaskan dari kepentingan elite dan diarahkan pada nilai kemanusiaan, barulah keadilan substantif dapat terwujud.

Ketiga, pengalaman para tokoh dalam film ini menegaskan bahwa pendidikan dan kebebasan berpikir adalah syarat pembebasan dari ketidakadilan. Minke mampu melawan kolonialisme melalui tulisan dan kesadaran kritisnya. Sementara Nyai Ontosoroh menjadi simbol bahwa pendidikan bahkan yang ditempuh secara otodidak—dapat mengangkat derajat dan mengoyak struktur opresi. Pelajaran bagi masa kini: keadilan sosial membutuhkan pendidikan yang inklusif, setara, dan tidak memperkuat hierarki sosial; serta keberanian intelektual untuk melawan narasi yang tidak adil.

Keempat, film ini memperlihatkan bahwa ketidakadilan tidak hanya lahir dari sistem, tetapi juga dari relasi kuasa yang tidak bermoral. Tuan Mellema dan pejabat kolonial memperlihatkan bagaimana kekuasaan tanpa etika berubah menjadi eksploitasi. Relevansinya saat ini terlihat pada berbagai praktik kekuasaan yang masih timpang: kekerasan terhadap perempuan, korupsi, penindasan minoritas, atau penyalahgunaan jabatan. Ingatan film mengajarkan bahwa etika, tanggung jawab, dan keberanian moral harus menjadi fondasi setiap relasi kuasa dalam masyarakat demokratis.

Dengan demikian, *Bumi Manusia* bukan hanya kisah sejarah, tetapi sumber etika sosial yang membantu masyarakat masa kini membaca bahaya-bahaya ketidakadilan. Ingatan ini memanggil generasi sekarang untuk membangun sistem hukum yang manusiawi, memperkuat pendidikan kritis, menjaga martabat manusia, serta menata relasi sosial dan politik yang beradab. Dari ingatan masa lalu itulah keadilan masa depan dapat dibentuk.

Hukum Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah

‘Hukum tumpul ke atas tajam ke bawah’, ungkapan ini tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Meskipun Indonesia sudah berstatus sebagai negara yang merdeka, akan tetapi ketidakadilan masih sering terjadi khususnya bagi kaum kecil atau masyarakat yang termarginalkan. Kejadian seperti ini tentu mengingatkan kita akan sejarah bangsa ini ketika mengalami ketidakadilan oleh bangsa asing. Anak bangsa bukannya trauma atas sejarah tersebut melainkan melakukan hal yang sama dan sangat tidak baik.

Beberapa tahun yang lalu dilansir oleh media, CNN Indonesia (Kamis, 23 April 2015), terjadi kasus di mana seorang nenek yang bernama Asiani yang berusia 70 tahun. Ia divonis sebagai orang yang bersalah, pengrusak hutan dengan hukuman penjara selama satu tahun dan masa percobaan selama lima belas bulan. Kronologi dari kisah nenek Asiani, berawal dari kejadian ketika nenek Asiani mengambil tujuh batang kayu jatih di halaman rumahnya di Desa Jatibanteng. Kayu yang diambil nenek Asiani hendak digunakan untuk keperluan perabotan rumah, akan tetapi pihak Perhutani mengklaim bahwa nenek Asiani mencuri kayu tersebut di lahan Perhutani. Karena itu nenek Asiani dilaporkan hingga ke pengadilan (*Nenek Asiani Dinyatakan Bersalah*, t.t.).

Ketika nenek Asiani menjalani sidang di pengadilan, di sana terjadi ketidakadilan yang cukup besar. Letak ketidakadilan yang dialami oleh nenek Asiani adalah yang pertama tidak mendapatkan perhatian dari hakim. Hakim hanya fokus pada apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum atau pihak Perhutani sementara banyak keterangan fakta yang diajukan oleh saksi-saksi dari nenek Asiani diabaikan saja. Di katakan Bahwa saksi tidak bisa memberikan keterangan yang jelas keterlibatan nenek Asiani dalam mencuri kayu. Akhirnya nenek Asiani dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 12d juncto Pasal 83 ayat 1d Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Representasi ketidakadilan dalam film *Bumi Manusia* menunjukkan bagaimana kolonialisme membangun struktur penindasan melalui rasisme, diskriminasi gender, penyalahgunaan hukum, serta relasi kuasa yang tidak bermoral, dan ingatan historis tersebut menegaskan bahwa keadilan masa kini tidak dapat diwujudkan tanpa pengakuan martabat manusia, reformasi hukum yang berpihak pada kemanusiaan, pendidikan yang membebaskan, serta pengawasan moral terhadap penggunaan kekuasaan. Kisah Nyai Ontosoroh, Minke, dan Annelies mengajarkan bahwa ketidakadilan bukan hanya masalah masa lalu, tetapi pola yang terus berulang bila masyarakat membiarkan hukum “tajam ke bawah, tumpul ke atas” dan membiarkan kelompok kecil serta rentan menjadi korban. Karena itu, *Bumi Manusia* menjadi pengingat bahwa membangun keadilan di Indonesia membutuhkan kesadaran kritis terhadap sejarah, keberanian melawan ketimpangan struktural, dan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih manusiawi, adil, dan beradab.

DAFTAR REFERENSI

- Abraham, A. (2025a). Dialog antara Amsal 17: 17 dan Siri'na Pacce: Eksplorasi nilai kebijaksanaan. *Divinitas Jurnal Filsafat dan Teologi Kontekstual*, 3(2), 365–376.
- Abraham, A. (2025b). Partisipasi orang muda Katolik dalam dunia politik: Tinjauan sistematik literature. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 25(2), 416–428.
- Abraham, A. (2025c). Peran cinta dalam teologi moral. *Damai: Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Filsafat*, 2(4), 61–68.
- Agustini, A., Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, S., Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Mesra, R., & Sari, M. N. (2024). Metode penelitian kualitatif: Teori dan panduan praktis analisis data kualitatif. *Penerbit Mifandi Mandiri Digital*, 1(01).
- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Jurnal Analisis Isi*.
- Akbar, V. K. (2017). Peran perempuan dalam novel *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer. *Bahastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(2), 232–236.
- CNN Indonesia. (n.d.). Nenek Asiani dinyatakan bersalah. *CNN Indonesia*. Retrieved November 18, 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150423151941-12-48782/nenek-asiani-dinyatakan-bersalah>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry research design*. SAGE Publications, Inc.
- Hardjasaputra, A. S. (2019). Sejarah dan pembangunan bangsa. *Jurnal Artefak*, 3(1), 1–6.
- Madung, O. G. (2012). Martabat manusia sebagai basis etis masyarakat multikultural. *Diskursus-Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, 11(2), 160–173.
- Merriam-Webster. (2025, November 13). Definition of justice. *Merriam-Webster Dictionary*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/justice>
- Rahmawati, N., Wibowo, A. A., & Nugrahani, R. (2022). Representasi pribumi dalam film *Bumi Manusia* (Kajian semiotika Saussure). *Journal of Computer Science and Visual Communication Design*, 7(1), 1–16.
- Said, I. G., Santosa, N. E. T. I., & Zuhdi Dh, A. (2023). Ingatan sejarah kolektif wong cilik tentang Pilpres 2019.
- Toer, P. A. (2002). *Bumi Manusia: Tetralogi Buru# 1*. Hasta Mitra.
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1–14.